

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pengawasan Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Kota Surabaya berdasarkan 3 (tiga) dasar menurut Sondang P. Siagian (2007) Dalam Handoko (2012) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan Standar Kerja

Melihat penetapan standar kerja bisa dikatakan sudah optimal, dikarenakan pengawasan pihak Disdukcapil dalam menetapkan SOP dalam pelayanan pengawasan terhadap orang asing mengacu dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor: 188.4/2037/436.7.11/2022 Tentang Standar Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil atau lebih spesifiknya di Lampiran 28 (dua puluh delapan) tanggal 08 Februari 2022 yaitu Standar Pelayanan Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing Yang Memiliki Izin Tinggal Tetap. Adanya SOP yang di aplikasi Klampid New Generation atau di Website langsung dari Disdukcapil Kota Surabaya, serta Website Cariyanlik yang di miliki oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan hal ini penyampaian terkait informasi adanya SOP baru, lalu pelaksanaan terhadap SOP baru dan kepuasan terhadap pelayanan Disdukcapil dengan adanya SOP baru ini sangat perlu dilakukan.

2. Pengukuran Hasil Kerja

Selanjutnya untuk pengukuran hasil kerja sudah cukup berperan secara maksimal. Karena dalam indikator pengukuran hasil kerja ini dimana dalam Standart Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan sebelumnya, Pihak Disdukcapil tentunya yang mengukur bagaimana pengawasan dibantu dengan adanya pihak luar seperti Satpol PP untuk menjalankannya. Diluar itu cara pengukurannya dimana pihak Disdukcapil dengan melihat secara langsung dampak yang ditimbulkan dengan adanya SOP baru apakah lebih baik di bandingkan SOP lama. Selain hal itu juga dalam mengukur tingkat keberhasilan penerapan SOP baru pihak Disdukcapil melihat terhadap tanggapan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang saat ini di berikan.

3. Tindakan Koreksi

Terakhir tindakan koreksi untuk hal ini sudah berperan dengan maksimal. Dapat dilihat ada beberapa hal yang dilakukan oleh Disdukcapil untuk menanggapi apabila ada ketidaksesuaian terhadap SOP dalam kegiatan pengawasan SKTT. Seperti diadakanya evaluasi dengan pengarahan langsung dari kepala bidang setelah itu diteruskan ke kepala seksi bagian evaluasi untuk mendapatkan solusi terkait masalah yang sedang terjadi. Selain dari evaluasi pihak Disdukcapil juga melakukan sebuah sosialisasi kepada 45 perusahaan dengan tujuan bisa mengantisipasi adanya penyimpangan terkait pengawasan orang asing dengan perusahaan tempat mereka berkerja. Disdukcapil Kota Surabaya tidak saja hanya dimaknai dengan memberi pelayanan semata, namun perlu adanya bentuk evaluasi dari penerima layanan (masyarakat) berupa reaksi dan feedback online maupun

offline dengan datang dan memasukan saranya langsung di kotak saran, dengan itu membenahi berbagai kekurangan yang tampak di suatu masalah.

Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pengawasan Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Kota Surabaya dari ketiga sub fokus tersebut untuk dalam hal penetapan standar kerja, pengukuran hasil kerja dan tindakan koreksi sudah cukup optimal untuk memberikan pelayanan dan upaya pencegahan agar tidak terjadi ketidaksesuaian terhadap SOP yang sudah di tetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pengawasan Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

Adapun beberapa rekomendasi saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk kedepanya lebih di perkuat lagi dalam penerapan SOP untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan administrasi pembuatan SKTT khususnya di area Surabaya di karenakan tentunya semakin lama akan semakin banyak orang asing yang akan masuk ke daerah Kota Surabaya.
2. Dimaksimalkan kembali dalam penyebaran informasi terkait Aplikasi Klampid New Generation karena banyak warga maupun dari pihak orang asing yang belum mengetahui aplikasi tersebut.